

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI: PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN PENGAMPUNAN PAJAK

Lita Dwi Damayanti¹
Pendidikan Akuntansi FKIP
Universitas PGRI Madiun
Litadwi06@gmail.com

Nik Amah²
Pendidikan Akuntansi FKIP
Universitas PGRI Madiun
sigmaku87@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Modernisasi sistem administrasi dan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun. Pengambilan sampel menggunakan teknik *Incidental*. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang menjadi karyawan di kota Madiun sejumlah 558 wajib pajak yang mengikuti pengampunan pajak. Dengan Rumus *solvin* sehingga di dapat sampel sejumlah 235. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Modernisasi sistem administrasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun, (2) Pengampunan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun, (3) Modernisasi sistem administrasi dan pengampunan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun.

Kata Kunci : Modernisasi sistem Administrasi; Pengampunan Pajak ; Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of modernization of administrative systems and tax forgiveness on taxpayer compliance of individuals registered in KPP Pratama Madiun. Sampling using Incidental technique. The population is taxpayers who become employees in the city of Madiun a number of 558 taxpayers who follow the tax amnesty. With solvin formula so that the sample can be a number of 235. Data collection in this study using questionnaires. The data analysis used in this research is multiple linear regression analysis. The results of this study show: (1) Modernization of administrative system partially does not affect the compliance of individual taxpayers registered in KPP Pratama Madiun, (2) tax amnesty partially affect the compliance of individual taxpayers registered in KPP Pratama Madiun., 3) Modernization of administrative system and tax amnesty simultaneously affect the compliance of individual taxpayers registered in KPP Pratama Madiun.

Keywords : Modernization of Administration System; Tax Amnesty; Personal Tax Payer Compliance



ASSETS
Jurnal Akuntansi
dan Pendidikan
Vol. 7 No. 1
Hlmn. 57-71
Madiun, April 2018
p-ISSN: 2302-6251
e-ISSN: 2477-4995

Artikel masuk:
16 November 2017
Tanggal diterima:
24 November 2017

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan dalam suatu negara. Penerimaan pajak yang optimal sangat diharapkan oleh suatu negara yang mana untuk pencapaian tujuan di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, sosial, pariwisata dan budaya. Semakin banyak penerimaan pajak yang diperoleh maka sangat membantu pertumbuhan negara. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang semakin pesat pada saat ini dapat memberikan dampak baik terhadap perpajakan di Indonesia. Perkembangan sistem perpajakan di Indonesia saat ini sudah mulai dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), hal ini ditandai dengan adanya Modernisasi Sistem Perpajakan yang mengalami peningkatan dalam pelayanan, keamanan serta kemudahan dalam penyampaian pajak, sehingga kepatuhan dari para wajib pajak dapat meningkat dari tahun ke tahun. Adanya modernisasi sistem perpajakan yang semakin baik diharapkan penerimaan pajak di Indonesia dapat terkontrol dan transparan.

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah (Candra, et al, 2013). Administrasi perpajakan adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi demi melaksanakan hak serta kewajiban di bidang perpajakan, Modernisasi sistem administrasi memiliki tujuan yaitu : (1) Tersedianya dokumen perpajakan dan informasi mengenai perpajakan dengan baik dan lengkap, (2) Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam organisasi perpajakan, (3) adanya pengambilan keputusan dan kebijakan mengenai pajak dengan baik (Pandiangan, 2013). Tujuan dari modernisasi yaitu untuk meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan memacu produktifitas pegawai yang tinggi (Rahayu dan Lingga ,2009). Penggunaan Teknologi Informasi yang semakin berkembang saat ini mampu dimanfaatkan oleh semua kalangan dalam kehidupan sehari - hari tidak lain bagi karyawan yang melakukan banyak kegiatan yang memanfaatkan teknologi dalam bekerja, semakin meningkatnya teknologi sangat membantu mereka dalam melakukan transaksi mulai dari pemanfaatan *E-Billing*, *E-Filling*, *E- SPT*, *E-Registration*.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak selain dapat dipengaruhi oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan, diduga juga dipengaruhi adanya Pengampunan Pajak. Pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan,(Hidayat, 2016). Keuntungan maupun tujuan pengampunan pajak mampu mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid dan komperhensif,(Kesuma, 2016). Pelaksanaan *Tax Amnesty* berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Pada

penelitian ini untuk mengukur variabel Pengampunan Pajak: yaitu wajib pajak membayar uang tebusan, Penyampaian surat pernyataan harta, wajib pajak memperoleh surat keterangan. Dengan cara ini wajib pajak yang belum melaporkan kewajibannya dalam membayar pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuannya. Pengampunan pajak ini dapat diikuti oleh wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi seperti, karyawan, pengusaha dan lainnya.

Menurut Sutedi (2011) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak ini dapat dipengaruhi dari beberapa hal di antaranya penyampaian SPT dengan tepat waktu, menghitung pajak yang terutang secara benar. Tidak dipatuhinya kewajiban-kewajiban perpajakan tersebut, dapat mengakibatkan wajib pajak dikenai sanksi perpajakan, yaitu sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa pidana denda dan pidana badan (kurungan/penjara). Apabila wajib pajak mempunyai sikap yang baik dalam membayar pajak dengan tepat waktu, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat, (Yuliana, Dan Isharijadi, 2014).

Hasil penelitian terdahulu, menurut (Candra, et al, 2013) tentang "Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak" menunjukkan pengaruh positif antara modernisasi sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak yang dapat dinyatakan dengan adanya modernisasi struktur organisasi kerja yang lebih baik seperti pembentukan organisasi berdasarkan fungsi dan tanggung jawab, sehingga tugas pelayanan dan pemeriksaan akan memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Kemudian *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang dapat ditunjukkan bahwa apabila *Tax Amnesty* mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, (Ngadiman dan Huslin, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi dan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Madiun. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dan mampu memberikan pemahaman terhadap wajib pajak untuk tetap patuh terhadap kewajibannya dalam bidang perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak di KPP Pratama Madiun. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib pajak orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun sebagai karyawan dan mengikuti pengampunan pajak. Sampel diambil menggunakan teknik *insidental* yaitu teknik sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila

dipandang orang yang kebetulan cocok sebagai sumber data (Sugiyono,2013). Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala *likert* melalui kuesioner, dengan menggunakan skala *likert* maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan program SPSS 22.0. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji linieritas, uji Autokorelasi, uji Multikolinieritas, uji Heteroskedastisitas, analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi (Sugiyono, 2013:207). Dalam penelitian ini statistik deskriptif yang digunakan yaitu nilai rata-rata (*mean*), *maximum*, *minimum* dan *standar deviation* dari jawaban responde. Uji validitas adalah terkait apakah instrumen atau alat ukur penelitian dapat mengukur apa yang kita ukur. Uji validitas digunakan untuk menguji pertanyaan atau item dari masing-masing variabel, (Natanael, 2013). Uji Reliabilitas untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui keandalan (konsistensi) instrumen (alat ukur) yang berupa kuesioner. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan teknik *cronbach's alpha* (Ghozali, 2013).

Uji Normalitas untuk menentukan apakah data variabel yang kita miliki mendekati populasi distribusi normal atau tidak. Pengujian menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (Analisis *Explore*) (Natanael ,2013). Uji Linieritas untuk mengetahui linieritas data, yaitu apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak. Taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila signifikansi (*Linearity*) kurang dari 0,05,(Priyatno, 2013).

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin - Watson (DW test) atau dengan menggunakan Run Test di mana untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10 maka dikatakan bahwa ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10 maka dikatakan bahwa

ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2013).

Menurut (Priyatno, 2013) Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk meramalkan variabel dependen jika variabel independen dinaikan atau diturunkan. Metode regresi berganda yaitu metode statistik untuk menguji pengaruh antara beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Sehingga dalam penelitian ini dapat ditunjukkan dengan model penelitian, sebagai berikut :

$$Y' = \alpha_0 + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2$$

Keterangan :

Y' : Kepatuhan wajib pajak

α_0 : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi

X₁ : Modernisasi Sistem Administrasi

X₂ : Pengampunan Pajak

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji individual (parsial) dan uji simultan. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah signifikan atau tidak. Variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, apakah signifikan atau tidak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai minimum modernisasi sistem administrasi (X₁) sebesar 10. Nilai maksimum menunjukkan nilai rata-rata tertinggi dimana nilai maksimum modernisasi sistem administrasi (X₁) sebesar 25. Sedangkan nilai rata-rata modernisasi sistem administrasi (X₁) sebesar 18,85. Nilai standar deviasi modernisasi sistem administrasi (X₁) sebesar 2,810. Nilai minimum pengampunan pajak (X₂) sebesar 10. Nilai maksimum menunjukkan nilai rata-rata tertinggi dimana nilai maksimum pengampunan pajak (X₂) sebesar 25. Sedangkan nilai rata-rata pengampunan pajak (X₂) sebesar 18,85. Nilai standar deviasi kinerja sosial (X₂) sebesar 2,605. Serta nilai minimum kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar 10. Nilai maksimum menunjukkan nilai rata-rata tertinggi dimana nilai maksimum kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar 24. Sedangkan nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar 18,56. Nilai standar deviasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar 2,742.

Berdasarkan uji validitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa item setiap variabel dari modernisasi sistem administrasi, pengampunan pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan *total pearson correlation* lebih besar nilai r tabel sebesar 0,128, sehingga dapat dinyatakan valid. Uji Reliabilitas menunjukkan bahwa Modernisasi sistem administrasi (X₁) memiliki *Crombach alpha* sebesar 0,792 > 0,60, Pengampunan pajak (X₂) memiliki *Crombach Alpha* sebesar 0,752 > 0,60, sedangkan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) memiliki *Crombach Alpha* sebesar 0,762 > 0,60. Hal tersebut

menunjukkan bahwa *Crombach Alpha* di atas nilai kritis dan dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian dinyatakan reliabel.

Berdasarkan hasil uji grafik, menunjukkan bahwa grafik histogram membentuk seperti lonceng (melengkung) sehingga menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Sedangkan pada *P-Plot* memperlihatkan titik-titik pada grafik dimana *P-Plot* menyebar mengikuti garis diagonal, sehingga menunjukkan data terdistribusi secara normal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi sudah memenuhi asumsi normalitas karena kedua grafik terdistribusi secara normal. Sedangkan berdasarkan hasil uji statistik non-parametrik *one-sample Kolmogorov Smirnov (K-S)*, menunjukkan bahwa nilai signifikan residual sebesar $0,759 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. Berdasarkan tabel uji linieritas menunjukkan nilai linierity pada modernisasi sistem administrasi (X_1) sebesar 0,717 dan pengampunan pajak (X_2) sebesar 0,000. Berdasarkan tabel uji autokorelasi dengan menggunakan uji Run tes nilai test sebesar 0,0837 dengan *probability* 0,472 signifikansi 0,05 yang berarti hipotesis nol diterima, sehingga dapat disimpulkan residual random atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual. Berdasarkan tabel uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai VIF, untuk modernisasi sistem administrasi memiliki nilai VIF senilai $1,001 < 10$ dan nilai *tolerance* senilai $0,999 > 0,10$, maka tidak terjadi multikolinieritas. Sedangkan pengampunan pajak memiliki nilai VIF senilai $1,001 < 10$ dan nilai *tolerance* senilai $0,999 > 0,10$, maka tidak terjadi multikolinieritas. Berdasarkan gambar *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam regresi linier. Sedangkan berdasarkan tabel uji *glejser* menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi (X_1) memiliki signifikan sebesar $1,000 > 0,05$ sedangkan pengampunan pajak (X_2) memiliki signifikan sebesar $1,000 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, persamaan linier dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = 3,295 - 0,044X_1 + 0,854X_2$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut konstanta sebesar 2,031 Artinya tanpa adanya pengaruh variabel independen yaitu Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak maka Kepatuhan Wajib pajak akan tetap memiliki nilai sebesar 3,295. Sedangkan variabel Modernisasi sistem administrasi ditingkatkan sebesar satu persen, maka akan berpengaruh pada penurunan tingkat kepatuhan sebesar 0,044. variabel Pengampunan Pajak sebesar 0,854 memiliki pengertian bahwa apabila terjadi peningkatan variabel Pengampunan Pajak penggunaan sebesar satu satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,854 satu satuan dengan asumsi variabel lain tetap.

Berdasarkan pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel modernisasi sistem administrasi dan pengampunan pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi maka hipotesis alternatif yang digunakan dalam pengujian koefisien model regresi secara parsial adalah

hipotesis alternatif (H_1) bertujuan untuk mengetahui pengaruh Modernisasi sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil uji regresi menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel Modernisasi sistem administrasi sebesar $0,245 > 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar $-1,166 < 1,970$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Modernisasi sistem administrasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hipotesis alternatif (H_2) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil uji regresi menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel pengampunan pajak sebesar $0,000 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $21,068 > 1,970$, sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengampunan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan tabel uji simultan(F) menunjukkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu sebesar $222,006 > 1,970$, sehingga variabel modernisasi sistem administrasi dan pengampunan pajak secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

PEMBAHASAN

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar KPP Pratama Madiun.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan oleh peneliti yaitu Modernisasi Sistem Administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan penyempurnaan atau perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan informasi teknologi yang dapat diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Meskipun fasilitas pelayanan di KPP Pratama tersebut telah di modernisasi dalam memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak, namun banyak masyarakat yang kurang memanfaatkan pelayanan dan penggunaan teknologi masih rendah. Hal ini juga dapat dilihat berdasarkan data primer hasil kuisioner dari 5 butir pertanyaan, *E-Registration* paling dipahami oleh wajib pajak sedangkan butir pertanyaan yang lain seperti *Account Representatif*, *E-SPT*, *E-Filling*, *E-Billing* belum sepenuhnya dipahami oleh wajib pajak karena masih perlunya bimbingan dari petugas pajak. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian menggunakan SPSS.20, hasil tersebut menunjukkan tingkat signifikan t sebesar 0,245 lebih besar dari 0,05 ($0,245 > 0,05$) dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar $-1,166 < 1,970$ maka hipotesis penelitian ini menerima H_0 dan menolak H_a . Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Irawan dan Khairani (2013) yang menunjukkan bahwa Modernisasi sistem administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena kurangnya peningkatan dalam kinerja organisasi, kurangnya kualitas pelayanan yang

optimal dan minimnya pengetahuan wajib pajak terhadap modernisasi sistem perpajakan saat ini. Jadi semakin rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap modernisasi sistem administrasi maka semakin sulit modernisasi sistem administrasi perpajakan diterapkan.

Pengaruh Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar KPP Pratama Madiun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengampunan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan oleh peneliti yaitu pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian menggunakan SPSS.20, hasil tersebut menunjukkan tingkat signifikan t sebesar 0,000 kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $21,068 > 1,970$ maka hipotesis penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_a . Hal ini menunjukkan bahwa Pengampunan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu berdasarkan data primer hasil kuisioner bahwa wajib pajak secara tidak langsung mampu menjawab pertanyaan dan memiliki kesadaran bahwa kewajibannya untuk membayarkan uang tebusan, maka diintegrasikan bahwa apabila Dirjen Pajak melakukan program pengampunan pajak secara teratur maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Hal ini dikarenakan banyaknya wajib pajak yang memiliki kesempatan untuk mengungkapkan kewajibannya yaitu utang dan tebusan dalam program pengampunan pajak.

Pengampunan pajak merupakan program penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Dengan adanya pengampunan pajak maka mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara wajib pajak mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) yang menyatakan bahwa pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar KPP Pratama Madiun.

Hasil penelitian yang dilakukan di atas menunjukkan bahwa variabel Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan yaitu terdapat pengaruh modernisasi sistem administrasi dan pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Adanya modernisasi sistem administrasi yang ada di KPP Pratama dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mengikuti pengampunan pajak sehingga secara tidak langsung penerapan modernisasi dari DJP telah dilakukan oleh wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan

SPSS.20 menunjukkan hasil signifikan f sebesar 0,000 kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan sebesar 222,006 sedangkan T_{tabel} sebesar 1,970 ($222,006 > 1,970$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi dan pengampunan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain berdasarkan penelitian ini bahwa variabel modernisasi sistem administrasi dan pengampunan pajak dapat digunakan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 65,4% dan sisanya dapat dijelaskan oleh faktor lain. Sehingga semakin besar penerapan modernisasi sistem administrasi dan kesadaran dalam mengikuti pengampunan pajak maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak secara tepat waktu dengan cara memanfaatkan *Account Representative* dan *E-System*.

Hal ini sejalan dengan penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) yang menunjukkan variabel *tax amnesty* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, begitu juga dengan penelitian Arifin, A.F (2015) bahwa pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun, sedangkan Pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun, kemudian Modernisasi sistem administrasi dan pengampunan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman terhadap penerapan modernisasi sistem administrasi dan kewajiban wajib pajak dalam mengikuti pengampunan pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini di antaranya adalah penelitian ini hanya meneliti pengaruh variabel modernisasi sistem administrasi dan pengampunan pajak. Selain itu, penelitian ini mengkaji kepatuhan pajak ditinjau wajib orang pribadi sebagai karyawan sehingga belum bisa digeneralisir untuk kepatuhan pajak Wajib Pajak Badan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan. Bagi Direktorat Jendral Pajak dan KPP, penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi mengenai Modernisasi Sistem Administrasi dengan lebih gencar melakukan penyuluhan dan memberikan informasi kepada masyarakat agar nantinya penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan seperti penggunaan *e-system* dan teknologi informasi dapat benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan perpajakan. Bagi pemerintah, penelitian ini sebagai masukan untuk meningkatkan kemampuan Pengawasan terhadap mekanisme *tax amnesty* / Pengampunan Pajak sehingga program tersebut dapat terselenggara secara efektif dan berkelanjutan. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengkaji dan meneliti variabel lain yang diduga mampu mempengaruhi Kepatuhan

Wajib Pajak seperti halnya denda administrasi pajak, citra otoritas pajak. Peneliti selanjutnya juga bisa mengkaji kepatuhan pajak ditinjau dari Wajib Pajak Badan, ataupun mengkaji kepatuhan pajak dengan memandang perbedaan antara kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*) dan kepatuhan pajak mengikat (*mandatory tax compliance*).

DAFTAR PUSTAKA

- Febrian, A. A. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama, *Perbanas*, 1 (1).
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Candra, W. & Mujilan.(2013). Modernisasi Sistem Administrasi dan Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 1(1).
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 ed 7*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Irawan & Khairani.(2013). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang,*eprints.mdp*.
- Kesuma, A.I. (2016). Pengampunan Pajak (*Tax Amnesti*) sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak. *Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen*, 12(2), 270-280.
- Ngadiman & Huslin, D. (2015). Pengaruh *Sunset Police, Tax Amnesti*, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan), *Jurnal Akuntansi*, XIX(2), 225-241.
- Pandiangan, L. (2014). *Modernisasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak Di Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Priyatno, D. (2013). Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate dengan SPSS. Yogyakarta: Gava Media.
- Purwono, H. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Rahayu, S. dan Lingga, I. S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak, *jurnal Akuntansi*, 1(2), 119-138.
- Sakti, N. W. dan Hidayat, A. (2016). *Tax Amnesty Itu Mudah*. Jakarta: PT Visimedia Pustaka.
- Sufren, Y. N. (2013). *Mahir Menggunakan SPSS Secara Otodidak*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R & D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuliana, R. & Isharijadi (2014). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Madiun, *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 3(2), 164-178.

LAMPIRAN

Lampiran 1. KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

No	Variabel	Indikator	Item	Sumber
1.	<i>Dependent:</i> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kewajiban Wajib pajak	1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP 2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. 3. Mengisi dengan benar SPT dan memasukan ke KPP dalam batas waktu yang telah ditentukan . 4. Menyelenggarakan pembukuan /pencatatan.	Mardiasmo (2011: 23)
2.	<i>Independent:</i> Modernisasi Sistem Adminstrasi	Struktur Organisasi - Adanya pelayanan <i>Account Representatif</i>	5. <i>Account Representatif</i> mampu membantu Wajib Pajak	Rahayu dan Lingga (2009).
		Prosedur Organisasi - Adanya Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	6. <i>E-Registration</i> 7. <i>E-SPT</i> 8. <i>E-Filling</i> 9. <i>E-Billing</i> 10. <i>E-Payment</i>	
3.	Pengampunan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Wajib Pajak Membayar uang tebusan • Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan • Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan 	11. Uang tebusan sama dengan kewajiban yang harus dibayar. 12. Yang diungkapkan berupa Harta, utang, nilai harta bersih. 13. Surat keterangan sebagai bukti pemberian pengampunan pajak.	Sakti N dan Hidayat, (2016)

Lampiran 2. HASIL UJI STATISTIK

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
X1	235	10	25	18,85	2,810
X2	235	10	25	18,85	2,605
Y	235	10	24	18,56	2,742
Valid N (listwise)	235				

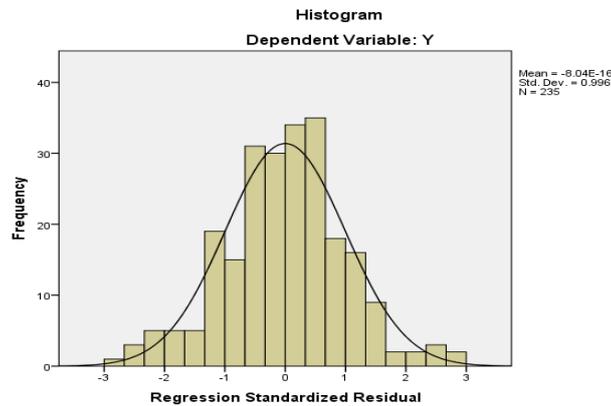
Uji Instrumen: Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Total pearson Correlation	Nilai r Minimal	Hasil
Modernisasi Sistem Administrasi(X1)	X1_1	0,734	0,128	Valid
	X1_2	0,788	0,128	Valid
	X1_3	0,795	0,128	Valid
	X1_4	0,773	0,128	Valid
	X1_5	0,655	0,128	Valid
Pengampunan Pajak (X2)	X2_1	0,397	0,128	Valid
	X2_2	0,606	0,128	Valid
	X2_3	0,755	0,128	Valid
	X2_4	0,763	0,128	Valid
	X3_5	0,606	0,128	Valid
KepatuhanWajibPajak (Y)	Y1_1	0,454	0,128	Valid
	Y1_2	0,850	0,128	Valid
	Y1_3	0,398	0,128	Valid
	Y1_4	0,673	0,128	Valid
	Y1_5	0,852	0,128	Valid

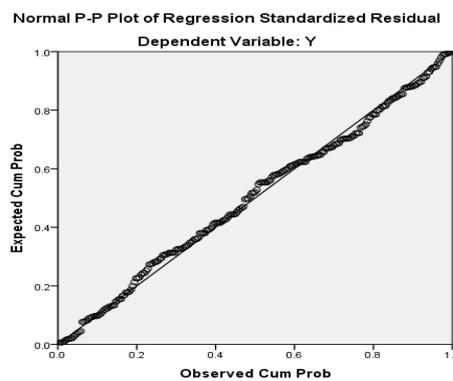
Uji Instrumen: Hasil Uji Reliabilitas

No	Varibel	Cronbach Alpha	Nilai Kritis	Hasil
1	Modernisasi Sistem Administrasi(X1)	0,792	0,60	Reliabel
2	PengampunanPajak (X2)	0,752	0,60	Reliabel
3	KepatuhanWajibPajak(Y)	0,762	0,60	Reliabel

Uji Asumsi Klasik: Normalitas
Analisis Grafik



Gambar 1. Grafik Histogram Program SPSS



Gambar 2. Grafik Normal Probability Plot

Uji Asumsi Klasik: Non-Parametrik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		235
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.60656228
Most Extreme Differences	Absolute	0,044
	Positive	0,044
	Negative	-0,043
Kolmogorov-Smirnov Z		0,671
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,759

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Asumsi Klasik: Uji Linieritas

Hasil Uji Linieritas Modernisasi Sistem Administrasi

			ANOVA Table				
			Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
KEPAT UHAN *	Betwe en Group	(Combined) Linearity Deviation	188,152 0,944	15 1	12,543 0,944	1,748 0,131	0,044 0,717
Modernisasi	s from	Linearity	187,209	14	13,372	1,863	0,032
Within Groups			1571,704	219	7,177		
Total			1759,855	234			

Uji Asumsi Klasik: Hasil Uji Linieritas Pengampunan Pajak

			ANOVA Table				
			Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
KEPAT UHAN *	Betwe en Group	(Combined) Linearity Deviation	1192,574 1152,351	14 1	85,184 1152,351	33,036 446,899	0,000 0,000
Pengampunan	ps from	Linearity	40,223	13	3,094	1,200	0,280
Within Groups			567,281	220	2,579		
Total			1759,855	234			

Uji Asumsi Klasik: Hasil Uji Autokorelasi

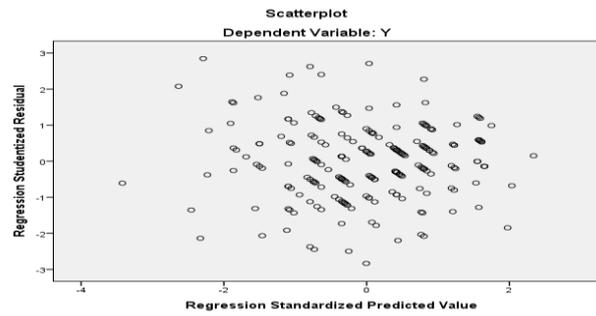
Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	0,08372
Cases < Test Value	117
Cases >= Test Value	118
Total Cases	235
Number of Runs	113
Z	-0,719
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,472

a. Median

Uji Asumsi Klasik: Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel independen	Tolerance	VIF	Interpretasi
X1	0,999	1,001	Tidak terjadi multikolinieritas
X2	0,999	1,001	Tidak terjadi multikolinieritas

Uji Asumsi Klasik: Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3. Grafik *Scatterplot*

Uji Asumsi Klasik: Hasil Uji *Glejser*

Model	T	Sig.	Keterangan
1 (Constant)	0,000	1,000	
MSA(X1)	0,000	1,000	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
PP(X2)	0,000	1,000	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Analisa Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,295	1,028		3,206	,002		
	X1	-,044	0,038	-,045	-1,166	,245	,999	1,001
	X2	,854	0,041	0,811	21,068	,000	,999	1,001

a. Dependent Variable: Y